

PENDIDIKAN SEJARAH UNTUK MEMPERKUAT PENDIDIKAN KARAKTER

S. Hamid Hasan

Jurusan Pendidikan Sejarah, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung
eshamidhasan@yahoo.com

ABSTRACT

Character education is an attempt to address the multidimensional crisis that is currently happening. This is done by instilling the values in education. Curriculum Center formulate at least there are 18 values of character education, namely religious, honesty, tolerance, discipline, hard work, creative, independent, democratic, curiosity, the spirit of nationalism, patriotism, recognize excellence, friendship / communicative, love peace, likes to read, care for the environment, social caring, and responsibility. In the history education, these values can be integrated in the learning. History education has a role promote character education because it was strategically to establish character and civilization of the nation's dignity. It also serves to realize nationalism and patriotism. Strengthening the lessons of history as a character education can be applied starting from the goal, the implementation of learning, materials, and media sources up to the assessment.

Keywords: character education, learning of history.

ABSTRAK

Pendidikan karakter merupakan satu upaya untuk menangani permasalahan krisis multidimensional yang saat ini terjadi. Hal ini dilakukan dengan penanaman nilai-nilai dalam pendidikan. Pusat Kurikulum merumuskan paling tidak ada 18 nilai pendidikan karakter, yakni religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Di dalam pendidikan sejarah, nilai-nilai tersebut dapat diintegrasikan dalam pembelajaran. Pendidikan sejarah berperan dalam pendidikan karakter karena pelajaran Sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Penguatan pelajaran sejarah sebagai pendidikan karakter dapat diterapkan mulai dari tujuan, pelaksanaan pembelajaran, materi, sumber dan media, sampai dengan penilaian.

Kata kunci: pendidikan karakter, pembelajaran sejarah.

PENDAHULUAN

Pendidikan adalah kegiatan sosial-budaya masyarakat dan bangsa yang sangat penting dan vital dalam membangun dan mengembangkan kualitas warganegara dan bangsa untuk kehidupan masa kini dan yang akan datang. Dalam setiap kegiatan pendidikan selalu ada kurikulum dan posisi kurikulum dalam kegiatan pendidikan

adalah "the heart of education" (Klein, 1997). Apa yang dilakukan dalam kegiatan pendidikan dalam membangun kualitas warganegara dan bangsa dapat dilihat dari kebijakan, perencanaan dan pelaksanaan kurikulum.

Kebijakan kurikulum terus menerus dikembangkan untuk menjawab perubahan yang terjadi di masyarakat dan bangsa. Perubahan-perubahan di masyarakat terjadi dari

waktu ke waktu sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat dan bangsa sebagai konsekuensi dari perkembangan kehidupan sosial-budaya-politik-ekonomi-agama, ilmu dan pengetahuan, teknologi. Perubahan tersebut menghendaki analisis tentang pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang diperlukan masyarakat dan bangsa sehingga mampu menjawab tantangan yang diakibatkan oleh perubahan-perubahan tersebut. Analisis tersebut disebut analisis kebutuhan (*needs analysis*) dan hasilnya menetapkan pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang sudah ada di masyarakat untuk dipertahankan dan dilanjutkan serta pengetahuan, ketrampilan, nilai, dan sikap "baru" yang perlu dikembangkan dalam kehidupan warga negara, masyarakat dan bangsa. Mungkin, pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang "baru" dapat berupa pengetahuan, ketrampilan, nilai, dan sikap yang sudah ada dalam khasanah kehidupan masyarakat di masa lalu tetapi dilupakan atau bahkan ditinggalkan. Mungkin pula, pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang "baru" tersebut berasal dari luar dan belum menjadi milik masyarakat dan bangsa sebelumnya.

Dalam wilayah Pendidikan Karakter Bangsa, keterampilan, nilai dan sikap yang dikembangkan kurikulum adalah sesuatu yang sudah pernah dimiliki masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi dikesampingkan dan tidak menjadi kepedulian utama pendidikan. Kepedulian terhadap pengetahuan yang berlebihan dan dijadikan indikator keberhasilan pendidikan telah menyebabkan pendidikan mengabaikan dimensi lain dari potensi manusia seperti aspek lain dari kemampuan kognitif, nilai dan sikap, kemampuan berkomunikasi dan hidup berdampingan, kebiasaan belajar, cinta tanah air, kebiasaan hidup sehat

dan sebagainya. Tradisi yang lama dan berakar dalam tes sebagai alat untuk mengetahui banyaknya pengetahuan yang dimiliki seseorang menyebabkan dimensi lain yang disebutkan tadi dan sukar diukur dengan tes menjadi terabaikan. Berbagai ketetapan dan upaya untuk mengembalikan fungsi pendidikan untuk mengembangkan keseluruhan potensi peserta didik terhalang dalam realisasinya. Tujuan pendidikan nasional yang jelas menggambarkan kualitas keseluruhan dimensi manusia dan kemanusiaan peserta didik tidak diindahkan dan hanya indah untuk diungkapkan dalam pidato. Ujian Nasional dalam fungsinya yang sekarang menjadi tonggak kokoh yang tak tergoyahkan dalam menegakkan banyaknya pengetahuan sebagai indikator pendidikan, walau pun mengorbankan kemampuan lain dari aspek kehidupan manusia.

Untuk itu diperlukan suatu tindakan tegas mengembalikan pendidikan pada jalurnya yang benar dan untuk itu maka Presiden menetapkan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Secara resmi, pendidikan budaya dan karakter bangsa dicanangkan pada tanggal 14 Januari 2010 di dalam sarasehan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Pada kesempatan tersebut berbagai unsur masyarakat diundang untuk mengemukakan pendapat dan saran mengenai nilai-nilai yang perlu dikembangkan dalam Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (PBKB). Pada sarasehan tersebut dikemukakan semacam "kesepakatan nasional" mengenai PBKB untuk mengembalikan bagian yang "hilang" dari pendidikan nasional sebagai bagian integral pendidikan nasional.

Pemikiran mengenai pentingnya pendidikan budaya dan karakter bangsa sudah banyak dikemukakan sebelumnya. Pada berbagai seminar penulis makalah ini telah mengemukakan

pentingnya pendidikan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa sebagaimana yang dirumuskan dalam tujuan pendidikan nasional. Dalam makalah yang disajikan pada Kongres Masyarakat Sejarah Indonesia tahun 2007 penulis telah mengemukakan bahwa pendidikan sejarah sudah seharusnya ikut mengembangkan berbagai potensi kemanusiaan yaitu “selain potensi intelektual manusia memiliki potensi emosi, potensi berkomunikasi melalui simbol, potensi minat, potensi spiritual, potensi bermasyarakat, potensi kebudayaan, potensi ekonomi, dan sebagainya”. Pada Saraasehan Nasional 100 Tahun Hari Kebangkitan Nasional, Mou DHD dan MSI Jatim di Surabaya pada bulan Mei 2008 kembali penulis mengemukakan pentingnya pendidikan sejarah dalam upaya membangun karakter bangsa (*nation and chracter building*). Pikiran demikian telah pula dikumenadangkan sejak paruh terakhir dekade 80-an abad yang lalu dalam berbagai kesempatan.

Gerakan pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah program yang dicanangkan sebagai program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu 2009 - 2014. Meski pun demikian, pada masa sebelumnya, secara de facto pekerjaan untuk mengembangkan pendidikan budaya dan karakter bangsa telah dilakukan oleh berbagai unit di Departemen Pendidikan Nasional (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan), di berbagai unit di bawah koordinasi Menko Kesra, dan masyarakat. Nama yang diberikan memang beragam seperti beragamnya istilah yang digunakan untuk pendidikan budaya dan pendidikan karakter. Dalam literatur di Indonesia pernah dikenal ada istilah Pendidikan Moral, Pendidikan Budi Pekerti, Pendidikan Civic: Manusia Baru Indonesia, dan sebagainya. Tentu saja ada berbagai variasi dalam tujuan, materi,

dan proses pembelajaran serta penilaian tetapi pada dasarnya program-program tersebut mengandung hakekat pendidikan budaya dan karakter bangsa. Sayangnya upaya-upaya tersebut tenggelam ketika berbenturan dengan indikator pengetahuan yang dijadikan tolok ukur keberhasilan pendidikan.

Oleh karena itu, penancangan pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai bagian yang integral dari pendidikan nasional adalah untuk mengembalikan pendidikan ke jalurnya suatu revitalisasi dan akomodasi dari berbagai upaya yang telah dilakukan sebelumnya. Permasalahan yang dihadapi masih sama yaitu kokohnya pandangan yang menempatkan pengetahuan di atas segala-galanya dan UN menjadi penjaga kebijakan. Pengetahuan adalah sesuatu yang penting untuk dipelajari dan dimiliki melalui kemampuan kognitif mengingat tetapi pengetahuan harus dijadikan bahan untuk mengembangkan kemampuan kognitif di atas mengingat dan memahami (aplikasi, analiisis, evaluasi, kreatif). Kemampuan kognitif baru terjadi apabila mendapatkan dorongan dan landasan dari kemauan menerima, merespon, dan menilai dari kemampuan afektif dan sebaliknya sebuah nilai menjadi milik seseorang dan berkembang menjadi bagian dari cara berpikir, bertindak, dan bersikap berdasarkan pengetahuan, pemahaman, dan evaluasi dri kemampuan kognitif. Kemampuan psikomotorik memerlukan pengetahuan, kemampuan kognitif, kemampuan afektif untuk dikembangkan menjadi suatu kemampuan psikomotorik pada tingkat mahir dan originalitas.

Usaha baru pengembangann budaya dan karakter bangsa memang harus melawan arus kelompok pengambil kebijakan, pelaksana pendidikan, dan juga masyarakat yang sudah terbiasa dan bahkan terbuai oleh praktek pen-

didikan selama ini dimana pendidikan disamakan dengan tes, pengukuran dan ujian serta pengukuran kemampuan intelektual terbatas pada jenjang kognitif mengingat dan memahami.

KONSEP PENDIDIKAN KARAKTER

Pengertian Pendidikan Karakter

Berbeda dari berbagai pengalaman kurikulum di Indonesia sebelumnya, pendidikan karakter bangsa tidak dimaknai sebagai pendidikan tentang nilai, moral, karakter, budaya, atau pun Pancasila. Pendidikan tentang nilai, moral, karakter, budaya atau pun Pancasila yang telah terjadi di masa lalu telah menghasilkan lebih banyak pengetahuan tentang nilai, moral, budaya, karakter atau pun Pancasila. Pendidikan karakter bangsa menerapkan visi dan teori pendidikan nilai yang didasarkan pada pandangan filosofi humanisme, progresivisme, dan rekonstruksi sosial bukan "*transfer of knowledge*" yang digunakan pada masa lalu dan yang mengkerdilkan pandangan filosofi esensialisme dan perenialisme. Pendekatan pengembangan kurikulum yang digunakan pun berbeda dari pemikiran "*moral cognitive*" yang dilahirkan Kohlberg sehingga tugas mengembangkan karakter tidak menjadi beban mata pelajaran tertentu tetapi menjadi tugas kurikulum secara utuh dan menyeluruh.

Pusat Pengembangan Kurikulum dan Perbukuan (Puskurbuk) telah mengembangkan konsep pendidikan budaya dan karakter bangsa. Untuk mendapatkan alur pembahasan yang tepat dan menempatkan posisi pendidikan sejarah dengan tepat pula dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa maka dokumen resmi yang telah diterbitkan Puskur dengan judul *Pedoman Pengembangan Budaya dan Karakter*

Bangsa di Sekolah menjadi materi utama dalam bagian ini.

Dalam dokumen tersebut, budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma dan keyakinan (*belief*) manusia yang dihasilkan masyarakat. Sistem berpikir, nilai, moral, norma dan keyakinan itu adalah hasil dari interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya. Sedangkan karakter dimaknai sebagai "watak, tabiat, akhlak, atau kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan (*virtues*) yang diyakininya dan digunakannya sebagai landasan untuk cara pandang, berpikir, bersikap, dan bertindak. Kebajikan terdiri atas sejumlah nilai, moral, dan norma seperti jujur, berani bertindak, dapat dipercaya, hormat kepada orang lain, dan sebagainya. Interaksi seseorang dengan orang lain menumbuhkan karakter masyarakat dan karakter bangsa".

Berdasarkan kedua pengertian tersebut dan pengertian pendidikan yang dinyatakan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional maka pendidikan budaya dan karakter bangsa diartikan sebagai proses internalisasi serta penghayatan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang dilakukan peserta didik secara aktif dibawah bimbingan guru, kepala sekolah dan tenaga kependidikan serta diwujudkan dalam kehidupannya di kelas, sekolah, dan masyarakat".

Tujuan Pendidikan Karakter

Selanjutnya, dokumen tersebut merumuskan tujuan pendidikan budaya dan karakter bangsa sebagai berikut:

- mengembangkan potensi afektif peserta didik sebagai manusia dan warganegara yang memiliki nilai-nilai budaya dan karakter bangsa;
- (2)

mengembangkan kebiasaan dan perilaku peserta didik yang terpuji dan sejalan dengan nilai-nilai universal dan tradisi budaya bangsa yang religius; (3) menanamkan jiwa kepemimpinan dan tanggung jawab peserta didik sebagai penerus bangsa; (4) mengembangkan kemampuan peserta didik menjadi manusia yang mandiri, kreatif, berwawasan kebangsaan; (5) mengembangkan lingkungan kehidupan sekolah sebagai lingkungan belajar yang aman, jujur, penuh kreativitas dan persahabatan, serta dengan rasa kebangsaan yang tinggi dan penuh kekuatan (*dignity*). (Puskur, Balitbang, 2010)

Nilai-Nilai Dalam Pendidikan Karakter

Nilai-nilai dalam Pendidikan Karakter dikembangkan berdasarkan beberapa sumber, yakni agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. *Pertama*, faktor agama. Masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama. Secara politis kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan budaya dan karakter bangsa harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.

Kedua, nilai-nilai Pancasila. Negara Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945 tersebut. Artinya, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni yang diatur dalam pasal-

pasal UUD 1945. Pendidikan budaya dan karakter bangsa bertujuan mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.

Ketiga, nilai-nilai budaya, artinya adalah suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat tersebut. Nilai-nilai budaya tersebut dijadikan dasar dalam memberi makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota masyarakat tersebut. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai-nilai dari pendidikan budaya dan karakter bangsa.

Keempat, tujuan pendidikan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah kualitas yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Di dalam tujuan pendidikan nasional terdapat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki seorang warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa dibandingkan ketiga sumber yang disebutkan di atas.

Berdasarkan keempat sumber/landasan tersebut maka nilai-nilai yang dapat dikembangkan kurikulum sekolah KTSP adalah sebagai berikut: (1) religius, (2) jujur, (3) toleransi, (4) disiplin, (5) kerja keras, (6) kreatif, (7) mandiri, (8) demokratis, (9) rasa ingin tahu, (10) semangat kebangsaan, (11) cinta tanah air, (12) menghargai prestasi, (13) bersahabat/komunikatif, (14) cinta damai, (15) gemar membaca, (16) peduli

lingkungan, (17) peduli sosial, dan (18) tanggung-jawab (Puskur, 2010)

Kedelapan belas nilai tersebut tidak bersifat mutlak harus dilaksanakan secara keseluruhan dan serentak dalam kurikulum sekolah. Sekolah diberi kebebasan untuk menambah nilai-nilai di atas dengan nilai-nilai yang hidup di masyarakat di mana suatu sekolah berada dan sekolah juga memiliki kebebasan untuk mengurangi nilai di atas.

Pembelajaran Pendidikan Karakter Bangsa

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, Pendidikan Karakter yang dirancang Puskurbuk berbeda dari pendekatan yang pernah dilakukan dalam kurikulum sebelumnya. Pendidikan Karakter tidak diajarkan sebagai sebuah mata pelajaran dan juga bukan sebuah konten yang dipelajari untuk pengembangan kemampuan kognitif. Materi Pendidikan Karakter adalah nilai dan pengembangannya diarahkan ke kemampuan afektif (menerima, merespon, menilai, mengorganisasi, dan karakterisasi). Sesuai dengan sifat materi afektif maka nilai-nilai dalam Pendidikan Karakter tidak diajarkan atau ditransfer tetapi ditumbuhkan (*inculcate*) pada diri peserta didik bersamaan dengan waktu mereka belajar suatu pokok bahasan. Proses belajar setiap pengetahuan dari setiap pokok bahasan digunakan sebagai media untuk mengembangkan nilai-nilai tersebut.

Berikut adalah prinsip yang digunakan dalam Pendidikan Karakter: *Pertama*, berkelanjutan mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa adalah sebuah proses panjang dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan. Sejatinya, proses tersebut dimulai dari

kelas satu SD atau tahun pertama dan berlangsung paling tidak sampai kelas 9 atau kelas terakhir SMP. Pendidikan budaya dan karakter bangsa di SMA adalah kelanjutan dari proses yang telah terjadi selama 9 tahun.

Kedua, melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah mensyaratkan bahwa proses pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui setiap mata pelajaran, dan dalam setiap kegiatan kurikuler dan ekstra kurikuler.

Ketiga, nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan mengandung makna bahwa materi nilai-nilai budaya dan karakter bangsa bukanlah bahan ajar biasa. Artinya, nilai-nilai tersebut tidak dijadikan pokok bahasan yang dikemukakan seperti halnya ketika mengajarkan suatu konsep, teori, prosedur, atau pun fakta seperti dalam mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, PKn, IPA, IPS, matematika, pendidikan jasmani dan kesehatan, seni, ketrampilan, dan sebagainya.

Materi pelajaran biasa digunakan sebagai bahan atau media untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Oleh karena itu guru tidak perlu mengubah pokok bahasan yang sudah ada tetapi menggunakan materi pokok bahasan itu untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Juga, guru tidak harus mengembangkan proses belajar khusus untuk mengembangkan nilai. Suatu hal yang selalu harus diingat bahwa satu aktivitas belajar dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif dan psikomotor.

Konsekuensi dari prinsip ini nilai-nilai budaya dan karakter bangsa tidak ditanyakan dalam ulangan ataupun ujian. Walaupun demikian, peserta didik perlu mengetahui pengertian dari suatu nilai yang sedang mereka tum-

buhkan pada diri mereka. Mereka tidak boleh berada dalam posisi tidak tahu dan tidak paham makna nilai tersebut.

Keempat, proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif. Prinsip ini menyatakan bahwa proses pendidikan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan oleh peserta didik bukan oleh guru. Guru menerapkan prinsip "tut wuri handayani" dalam setiap perilaku yang ditunjukkan peserta didik.

Diawali dengan pengenalan terhadap pengertian nilai yang dikembangkan maka guru menuntun peserta didik agar secara aktif (tanpa mengatakan kepada peserta didik bahwa mereka harus aktif tapi guru merencanakan kegiatan belajar yang menyebabkan siswa aktif merumuskan pertanyaan, mencari sumber informasi dan mengumpulkan informasi dari sumber, mengolah informasi yang sudah dimiliki, merekonstruksi data/fakta/nilai, menyajikan hasil rekonstruksi/proses pengembangan nilai) menumbuhkan nilai-nilai budaya dan karakter pada diri mereka melalui berbagai kegiatan belajar yang terjadi di kelas, sekolah, dan tugas-tugas di luar sekolah. Keempat prinsip pembelajaran tersebut menghendaki adanya berbagai perubahan dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi hasil belajar.

POTENSI PENDIDIKAN SEJARAH DALAM PENDIDIKAN KARAKTER

Mata pelajaran Sejarah memiliki arti strategis dalam pembentukan watak dan peradaban bangsa yang bermartabat serta dalam pembentukan manusia Indonesia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Dengan karakter materi yang dinyatakan dalam Peraturan Mendiknas, pendidikan sejarah, baik sebagai bagian IPS mau pun seba-

gai mata pelajaran merupakan salah satu mata pelajaran yang memiliki potensi besar dalam mengembangkan pendidikan karakter. Meski pun program sejarah merupakan salah satu bagian dari orkestra pendidikan karakter, materi pendidikan sejarah yang khas dan penuh dengan nilai memiliki paling memiliki potensi kuat untuk memperkenalkan kepada peserta didik tentang bangsa dan aspirasinya di masa lampau. Melalui pelajaran sejarah peserta didik dapat melakukan kajian mengenai apa dan bila, mengapa, bagaimana, serta akibat apa yang timbul dari jawaban masyarakat bangsa di masa lampau tersebut terhadap tantangan yang mereka hadapi serta dampaknya bagi kehidupan pada masa sesudah peristiwa itu dan masa kini. Materi pendidikan sejarah mampu mengembangkan potensi peserta didik untuk mengenal nilai-nilai bangsa yang diperjuangkan pada masa lalu, dipertahankan dan disesuaikan untuk kehidupan masa kini, dan dikembangkan lebih lanjut untuk kehidupan masa depan. Bangsa Indonesia masa kini beserta seluruh nilai dan kehidupan yang terjadi adalah hasil perjuangan bangsa pada masa lalu dan akan menjadi modal untuk perjuangan kehidupan pada masa menatang.

Materi sejarah memberikan informasi mengenai keberhasilan dan kegagalan bangsa dalam menjawab tantangan zaman sehingga menjadi milik bangsa masa kini. Tindakan apa yang dilakukan para pelaku sejarah yang tidak berhasil mencapai tujuan dan perbuatan apa yang mereka lakukan yang berhasil mencapai tujuan. Materi yang tercantum dalam cerita sejarah bukan hanya cerita sukses tetapi juga cerita kegagalan. Keberhasilan dan kegagalan adalah hal yang terjadi dalam kehidupan nyata manusia. Kedua sisi kehidupan itu, keberhasilan dan kega-

galan, menjadi pelajaran penting. Dengan sifat materi yang demikian, dalam mengembangkan pendidikan karakter, materi pendidikan sejarah merupakan mengembangkan fungsi pendidikan sejarah sebagai "*bank of examples for solving present problems and chartering future action*" (Wineburg, 2001) terkikis oleh suasana batin bangsa dan keterbatasan kebijakan pendidikan yang menempatkan pengetahuan di atas segalanya

Selanjutnya, sebagaimana yang dikemukakan Prof. Dr. Sartono Kartodirdjo (1997), salah satu fungsi belajar sejarah untuk mengenal siapa diri kita sebagai bangsa. Pengenalan jatidiri yang dikemukakan Sartono sangat penting sebagaimana dikatakan Cartwright (1999:44) bahwa "*our personal identity is the most important thing we possess*" dan kehilangan jatidiri berarti kehilangan eksistensi bangsa. Sebagaimana dikemukakan Cartwright identitas pribadi atau kelompok tersebut "*defines who and what we are. The way we feel about ourselves, the way we express ourselves and the way other people see us are all vital elements in the composition of our individual personality*". Dalam fungsi ini materi pendidikan sejarah harus mampu mengembangkan memori kolektif sebagai bangsa pada diri peserta didik.

Bangsa Indonesia dilahirkan oleh para pemimpin bangsa yang mengembangkan kepemimpinan dan mendapat legalitas dari masyarakat Nusantara. Para pemimpin bangsa tersebut bukan berasal dari organisasi politik tradisional (kerajaan) yang telah ada di nusantara tetapi keberadaan negara-negara Nusantara itu telah menjadi aspirasi dan inspirasi mereka untuk membangun sebuah negara dan bangsa. Mereka adalah pemimpin yang mendapatkan pengakuan sebagai pemimpin bangsa atas dasar organisasi baru yaitu organisasi agama, ekonomi, politik, sosial, budaya yang menyebar

dan berkembang di wilayah nusantara menjadi penyatu dalam gerak masyarakat. Tekad untuk mendirikan bangsa dan negara yang dimulai sejak tahun 1928 dilanjutkan dengan perjuangan pada masa-masa berikutnya sampai dengan proklamasi kemerdekaan oleh para pemimpin organisasi-organisasi baru ini, kemudian dilanjutkan oleh Pemerintah dan seluruh anggota bangsa dari negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, melalui materi pendidikan sejarah peserta didik belajar mengenal bangsanya dan dirinya.

Dalam membangun memori kolektif bangsa perlu pemikiran yang lebih mendalam mengenai materi pendidikan sejarah. Materi pendidikan sejarah akan mampu membangun memori kolektif sebagai bangsa hasil belajar apabila ada proses identifikasi yang kuat dari peserta didik terhadap peristiwa sejarah yang dipelajari. Untuk itu ada beberapa kriteria dalam memilih materi pendidikan sejarah: *Pertama*, identifikasi yang kuat terjadi apabila setiap peserta didik merasakan adanya keterwakilan nenek moyang dalam perjuangan membangun bangsa ini sejak zaman yang paling tua yang dapat diketahui dari sumber sejarah yang tersedia. Secara sederhana hal ini tercermin dari peristiwa sejarah dari suatu unit pemerintahan atau budaya. Unit pemerintahan mungkin saja pada satuan propinsi atau jika mungkin pada satuan di bawahnya (kabupaten/ kota atau bahkan kecamatan). Unit budaya diwakili oleh suku. Tentu saja kedua kriteria ini tidak harus digunakan secara terpisah atau pun keduanya harus terpenuhi. Apabila salah satu dari kriteria ini terpenuhi terutama unit pemerintahan maka hal tersebut dapat dianggap cukup.

Kedua, periode yang penting dalam perwakilan itu adalah sejak ke-

bangkitan nasional. Periode ini penting karena perjuangan pada masa ini lebih merakyat, pemimpin perjuangan tidak terpilih karena keturunan/darah tetapi lebih pada kemampuan, arah perjuangan lebih jelas dan tegas pada pembentukan negara dan bangsa Indonesia.

Ketiga, perlu keseimbangan peristiwa sejarah yang dipelajari peserta didik antara peristiwa yang terjadi di wilayah tempat tinggalnya (dalam unit propinsi atau di bawahnya) dengan peristiwa yang terjadi di daerah lain. Pengkajian dan pemilihan tersebut harus berani dalam menentukan berupa penambahan atau penghapusan peristiwa-peristiwa sejarah yang secara tradisional ada pada kurikulum.

Keempat, peristiwa sejarah yang terjadi di lingkungan propinsi, kabupaten/ kota atau di bawahnya yang dinyatakan/dianggap sebagai peristiwa sejarah nasional memiliki prioritas untuk dipilih tetapi peristiwa sejarah yang dinyatakan/dianggap sebagai peristiwa sejarah lokal dapat dipilih untuk dijadikan pokok bahasan tambahan apabila peristiwa sejarah tingkat nasional tidak/ belum diketahui.

Kelima, organisasi materi pendidikan sejarah di mulai dari peristiwa yang terjadi di lingkungan terdekat pada diri peserta didik sampai ke tingkat nasional dan internasional. Materi pendidikan sejarah harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengenal masyarakat terdekatnya (dari tinjauan historis) sampai kepada bangsanya dan ummat manusia (sejarah kota/ kabupaten, sejarah propinsi, sejarah nasional).

Berdasarkan kriteria yang dikemukakan di atas dirasakan perlu ada peninjauan ulang untuk pokok bahasan/materi pokok pendidikan sejarah untuk SD/MI dan SMP/MTs. Peninjauan ulang itu harus menjawab pertanyaan apa kaitan kesinambungan antara

peristiwa sejarah yang dipelajari di SD dengan yang di SMP: apakah merupakan perluasan wilayah, penambahan peristiwa atautkah pendalaman. Pertanyaan ini harus dijawab dengan penuh kehati-hatian karena tingkat kemampuan peserta didik SD kelas 1-4 berbeda dibandingkan dengan tingkat kemampuan peserta didik SD kelas 5-6, dan dapat dikatakan peserta didik kelas 5-6 SD memiliki jenjang kemampuan berpikir operasional yang sama dengan anak SMP.

Sesuai dengan tiga konsep waktu sejarah, materi pendidikan sejarah yang bercerita tentang perjuangan manusia di masa lampau harus memiliki potensi untuk dipelajari dan diterapkan dalam kehidupan masa kini. Pemanfaatan informasi yang diperoleh dari pendidikan sejarah bagi kehidupan masa kini menjadi sangat penting untuk memaksimalkan potensi pendidikan sejarah sebagai pelajaran bagi generasi masa kini, sebagaimana dinyatakan oleh Borries (Stearns, Sexas dan Weinburg, 2000: 247):

morally judge historical events according to the standards of human and civil rights; explain the situation in the world today and find out the tendencies of change; acknowledge the traditions, characteristics, values, and tasks of our nation and society; values the preservation of historical relics and old buildings; internalize basic democratic value.

Atas dasar apa yang telah dikemukakan jelas terlihat bahwa materi pendidikan sejarah sangat potensial bahkan esensial untuk mengembangkan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Untuk itu materi pendidikan sejarah harus berubah dari materi yang kaya fakta tapi kering nilai menjadi materi yang mencakup materi yang dapat menjelaskan kenyataan kehidupan masa kini, arah perubahan yang sedang ter-

jadi, tradisi, nilai, moral, semangat perjuangan yang hidup di masyarakat ketika suatu peristiwa sejarah terjadi dan masih diwariskan hingga masa kini. Tentu saja pernyataan ini tidak meniadakan potensi materi lain yang juga harus berama-sama pendidikan sejarah berupaya bersama untuk mengembangkan pendidikan karakter.

REVITALISASI PENDIDIKAN SEJARAH UNTUK PENDIDIKAN KARAKTER

Sebagaimana dikemukakan di atas bahwa kebijakan kurikulum yang ditentukan menempatkan pendidikan karakter sebagai pendidikan yang dilaksanakan melalui semua mata pelajaran dan semua jenjang pendidikan (pendidikan dasar, menengah, dan tinggi). Meski pun demikian, pembahasan mengenai peran pendidikan sejarah tetap diperlukan mengingat berbagai penyesuaian dan pengembangan dalam tujuan dan materi pendidikan sejarah harus dilakukan. Lagipula pula posisi kurikulum pendidikan sejarah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah berbeda mengingat fungsi dan tujuan pendidikan dasar berbeda dari pendidikan menengah.

Pada jenjang pendidikan dasar pendidikan sejarah merupakan bagian dari pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, kedudukan ini sama dengan kedudukan di kurikulum SMK. Sedangkan di SMA, pendidikan sejarah menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri. Perbedaan tersebut disebabkan oleh perbedaan fungsi materi sejarah sebagai media pendidikan. Di jenjang pendidikan dasar materi pendidikan sejarah memiliki peran yang sangat berat dalam memupuk rasa kebangsaan melalui pengembangan "*collective memory*" sebagai bangsa. Selain itu, pada jenjang pen-

didikan dasar materi pendidikan sejarah harus dijadikan materi pendidikan bagi seluruh anak bangsa yang mengikuti jenjang pendidikan dasar. Artinya, materi pendidikan sejarah harus dipelajari seluruh peserta didik selama 9 tahun sehingga mereka memiliki memori kolektif sebagai suatu bangsa yang cukup, berpikir dan bersikap sebagai warganegara yang bertanggungjawab, bersikap kreatif dan produktif, memiliki rasa ingin tahu dan kemampuan belajar sepanjang hayat. Oleh karena itu, tujuan pendidikan sejarah (dalam IPS) memiliki tugas mengembangkan pengetahuan dasar tentang peristiwa sejarah di tanah air yang diperlukan untuk membangun memori kolektif sebagai bangsa, memiliki wawasan dan cara pandang sebagai satu bangsa, berkemampuan untuk mengembangkan kehidupan dirinya, masyarakat, dan bangsanya dalam suatu kehidupan yang disiplin, produktif, bertanggungjawab, demokratis, dan sehat. Untuk itu maka revitalisasi pendidikan sejarah meliputi tujuan, materi pembelajaran, proses pembelajaran, dan asesmen hasil belajar.

Tujuan Pendidikan Sejarah

Tujuan pendidikan sejarah di pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs) untuk dapat mengembangkan nilai dan karakter bangsa pada peserta didik adalah: (1) Mengembangkan pengetahuan dan pemahaman tentang berbagai peristiwa sejarah penting dan esensial untuk membangun memori kolektif sebagai bangsa; (2) Mengembangkan semangat kebangsaan; (3) Mengembangkan daya berpikir kronologis, kritis dan kreatif; (4) Mengembangkan rasa ingin tahu; (5) Preservasi kecermerlangan masa lalu; (6) Membangun kejujuran, kerja keras, dan tanggungjawab; (7) mengembangkan nilai dan sikap

kepahlawanan, kepemimpinan dan inspirasi; (8) mengembangkan persahabatan dan kepedulian sosial; (8) mengembangkan kemampuan berkomunikasi; (9) mengembangkan kemampuan mencari, mengolah, mengemas, dan mengkomunikasikan informasi.

Pada pendidikan sejarah di SMA/MA tujuan pendidikan sejarah sudah berkembang mengarah kepada pemahaman secara mendalam berbagai peristiwa sejarah yang dianggap penting untuk membangun kemampuan berpikir kritis, kemampuan belajar, rasa ingin tahu, kepedulian sosial dan semangat kebangsaan. Sesuai dengan kebijakan mengenai wajib belajar sembilan tahun dan kenyataan bahwa hanya sebagian saja dari masyarakat Indonesia yang mampu mengikuti pendidikan di SMA maka pendidikan sejarah di SMA sudah lebih terarah kepada persiapan bagi mereka yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Mereka yang mengikuti pendidikan sejarah adalah mereka yang dianggap memiliki perhatian dan minat khusus terhadap sejarah. Pendidikan sejarah tidak lagi menjadi pendidikan untuk semua peserta didik.

Atas dasar pemikiran tersebut maka tujuan pendidikan sejarah di SMA adalah: (1) Mengembangkan kemampuan berpikir kronologis, kritis dan kreatif; (2) Membangun kepedulian sosial; (3) Mengembangkan semangat kebangsaan; (4) Membangun kejujuran, kerja keras, dan tanggungjawab; (5) Mengembangkan rasa ingin tahu; (6) Mengembangkan nilai dan sikap kepahlawanan serta kepemimpinan; (7) mengembangkan kemampuan berkomunikasi; (8) mengembangkan kemampuan mencari, mengolah, mengemas, dan mengkomunikasikan informasi.

Tentu saja jumlah butir tujuan bukanlah suatu indikasi tingkat kedalaman atau kesulitan pelajaran. Pada jen-

jang SMA pendalaman suatu peristiwa sejarah sudah menjadi suatu keharusan. Melalui pendalaman tersebut peserta didik mampu menemukan nilai-nilai dari suatu peristiwa sejarah. Mereka dapat memantapkan nilai tadi melalui diskusi kelas dan melakukan upaya internalisasi nilai-nilai.

Materi Pendidikan Sejarah

Tujuan pendidikan sejarah di jenjang pendidikan dasar memberikan rambu-rambu mengenai pemilihan peristiwa sejarah untuk menjadi pokok bahasan. Dengan rambu-rambu ini maka peristiwa sejarah terpilih harus memberikan keadaran kepada diri peserta didik tentang bangsa ini, nilai-nilai yang diperjuangkan bangsa, semangat persatuan yang mengalami berbagai tantangan dan hambatan tetapi selalu dapat diselesaikan dengan baik. Pemilihan peristiwa itu harus dimulai dari peristiwa yang paling dekat dengan lingkungan peserta didik, meluas hingga ke peristiwa yang bersifat nasional.

Kedalaman pengetahuan dan pemahaman suatu peristiwa bukan tujuan utama tetapi keluasan cakupan peristiwa adalah sangat penting. Membangun suatu memori kolektif bangsa harus memperhatikan keberimbangan peristiwa satu daerah dengan daerah lainnya sehingga setiap warga mengenal adanya perjuangan daerah lain dalam mendirikan, mempersatukan, dan mengembangkan kehidupan kebangsaan (tidak lagi bersifat Jawa Sentris sebagaimana yang terjadi pada saat kini).

Pemilihan peristiwa sejarah untuk dijadikan pokok bahasan dalam kurikulum sejarah sudah lebih berdasarkan prinsip ketertarikan peserta didik pada suatu peristiwa dan kebermaknaan

suatu peristiwa dalam mengembangkan tujuan. Pokok bahasan tidak lagi menjadi daftar "entry" peristiwa sejarah yang tersebar sedemikian banyak sebagaimana layaknya sebuah encyclopedia. Peristiwa penting sejarah nasional dan sejarah daerah haruslah dikemas dalam "strand" yang dinamakan oleh Waterworth (2000: 19) sebagai kemasan yang "menampung atau memperluas apresiasi peserta didik terhadap peristiwa sejarah yang dipelajarinya".

Atas dasar pemikiran tersebut maka peristiwa-peristiwa sejarah dikemas dalam "strands" sebagai berikut: (1) asal usul dan warisan bangsa Indonesia dan dunia; (2) tokoh dan hari besar bangsa; (3) kehidupan awal kenegaraan masyarakat Indonesia; (4) awal kehidupan bangsa Indonesia modern; (5) kelahiran negara dan bangsa Indonesia modern; (6) perkembangan kehidupan pemerintahan negara dan bangsa Indonesia masa kini; (7) peran bangsa Indonesia dalam membangun masyarakat dunia; (8) kehidupan bangsa Indonesia masa kini dan perannya dalam perdamaian dunia.

Integrasi Nilai Pendidikan Karakter ke dalam Kurikulum SD/MI, SMP/MTS, dan SMA/MA

Pengintegrasian atau mungkin lebih tepat disebut "alignment" adalah suatu proses memperkaya mata pelajaran Sejarah yang sedang dilaksanakan dengan nilai dalam Pendidikan Karakter. Proses tersebut dilakukan melalui langkah-langkah berikut: *Pertama*, memasukkan nilai terpilih dari Pendidikan Karakter ketrampilan dalam silabus pelajaran IPS dan Sejarah. Jika mata pelajaran sejarah untuk masing-masing kelas tersebut dilakukan oleh seorang guru maka proses memasukkan nilai dilakukan secara individual tetapi guru

tersebut harus tetap menjamin keajegan organisasi horizontal dengan kelas lain dan mata pelajaran lain serta keajegan vertikal.

Kedua, memasukkan nilai Pendidikan Karakter dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang dikembangkan guru sejarah. Format yang telah digunakan oleh satuan pendidikan dapat digunakan tetapi diperkaya dengan menambah kolom nilai. Selanjutnya perlu diingat bahwa dengan adanya nilai yang ditambahkan maka: (1) Tujuan pembelajaran dan materi pembelajaran harus diperkaya dengan penguasaan nilai, (2) Proses pembelajaran (metoda dan langkah) yang dipilih harus sesuai untuk mengembangkan nilai melalui proses belajar siswa aktif dengan pendekatan pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*).

Ketiga, melaksanakan pembelajaran sesuai dengan RPP dengan memperhatikan proses pembelajaran untuk penguasaan ketrampilan dan internalisasi nilai. *Keempat*, melaksanakan penilaian hasil belajar

Proses Pembelajaran

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, belajar aktif adalah konten kurikulum yang termasuk dalam kategori ketrampilan (intelektual dan psikomotorik) dan nilai serta sikap. Konten kurikulum dalam kedua kategori ini berbeda dari konten pengetahuan. Konten pengetahuan adalah konten yang dipelajari tetapi sekaligus digunakan sebagai wahana atau media untuk mengembangkan konten ketrampilan dan sikap serta nilai. Dengan perkataan lain, ketiga kelompok konten tersebut (pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap) terintegrasi dalam kegiatan pembelajaran dan dalam rancangan kurikulum, silabus dan RPP. Artinya, konten

yang dikategorikan sebagai nilai dan sikap hanya dapat dikembangkan dengan baik melalui pembelajaran mengenai pengetahuan melalui aktivitas belajar aktif tetapi dalam suatu proses pembelajaran tidak langsung (*indirect teaching*). Dengan perkataan lain, ketika terjadi proses pembelajaran mengenai pengetahuan yang terkandung dalam sebuah peristiwa sejarah maka pada saat bersamaan dikembangkan penanaman nilai dan sikap.

Sebagaimana dikatakan oleh Borwell dan Eison (1991) dalam pengembangan pembelajaran ada 5 hal yang perlu diperhatikan, yaitu:

(1) *student involvement beyond mere listening*; (2) *more emphasis on the development of skills and less on transmittal of information*; (3) *student involvement in higher order thinking skills*; (4) *student involvement in activities, such as reading, discussing, writing*; and (5) *an emphasis on students' exploration of values and attitudes*.

Rancangan kurikulum, terutama organisasi konten kurikulum harus memperhitungkan kelima hal di atas. Untuk unsur pertama dikembangkan dalam bentuk proses pembelajaran. Sedangkan keempat unsur lain perlu secara eksplisit tercantum dalam organisasi konten kurikulum.

Pada pengembangan ini perlu "*interwoven*" konten pengetahuan yang terdapat pada pokok bahasan/topik, ketrampilan belajar aktif yang harus dikembangkan dan nilai serta sikap. Ketrampilan belajar aktif perlu dirinci sehingga pengembangan ketrampilan itu dapat dilakukan pada semester awal dan dikembangkan pada semester berikutnya. Sedangkan nilai dan sikap tidak dirinci dalam nilai dan sikap yang harus dikembangkan pada semester awal dan lanjutan. Berbeda dari ketrampilan, sikap selalu dikembangkan dari

awal sampai semester terakhir suatu satuan pendidikan atau bahkan satu jenjang pendidikan.

Nilai dan sikap yang perlu dikembangkan untuk keberhasilan belajar aktif terutama untuk jenjang belajar aktif "*autonomous*" adalah rasa ingin tahu (*curiosity*), sabar, inovatif, kreatif, dan mandiri. Nilai-nilai ini dikembangkan bersamaan (*indirect teaching*) ketika peserta didik mempelajari materi pokok bahasan yang terdapat pada sebuah SK/KD dan mengembangkan kemampuan kognitif serta psikomotorik.

Pendekatan "*curriculum based*" atau "*school based*" menuntut implementasi kurikulum sebagai satu kesatuan pelaksanaan guru di sekolah dalam satu kesatuan. Guru di bawah pimpinan kepala sekolah secara bersama-sama (sebagai suatu "*community of educators*") merencanakan implementasi kurikulum, melaksanakan proses implementasi di kelas-sekolah-masyarakat, dan dalam penilaian hasil belajar serta langkah tindak lanjut. Implementasi kurikulum yang berdasarkan "*subject-based*" secara terpisah dan dilakukan guru secara terpisah pula, sebagaimana yang banyak dilaksanakan di sekolah pada saat sekarang, menimbulkan ancaman ketidakberhasilan penerapan belajar aktif. Lagipula, praktek semacam itu tidak bersesuaian dengan pengertian kurikulum yang dikemukakan di awal bagian ini. Keberhasilan implementasi kurikulum sebagai satu kesatuan ide pedagogis pengembang kurikulum menjadi keharusan dalam kurikulum yang mengembangkan konten ketrampilan, nilai, dan sikap. Pelaksanaan implementasi kurikulum sebagaimana yang banyak dilakukan pada saat sekarang hanya sesuai untuk kurikulum yang berfokus pada pengembangan konten pengetahuan berupa hafalan dan pemahaman terhadap pengetahuan (tentang fakta, istilah, kategori, definisi, penda-

pat, prosedur, prinsip, generalisasi, teori, teknik, metoda, kriteria, dan sebagainya).

Penilaian Hasil Belajar Sejarah

Perubahan dalam fungsi dan tujuan mata pelajaran sejarah memerlukan perubahan dalam asesmen hasil belajar. Model "*classroom assessment*" digunakan sebagai pendekatan penilaian hasil belajar mata pelajaran Sejarah. Model ini menekankan pada "*formative assessment*" dengan tujuan penilaian adalah: *Pertama*. Menentukan aspek dari hasil belajar Sejarah yang sudah dan belum dikuasai peserta didik sesudah suatu proses pembelajaran. *Kedua*, umpan balik bagi peserta didik untuk memperbaiki hasil belajar yang kurang atau belum dikuasai. *Ketiga*, umpan balik bagi guru untuk memberikan bantuan bagi peserta didik yang mengalami masalah dalam penguasaan pengetahuan, kemampuan, nilai dan sikap. *Keempat*, umpan balik bagi guru untuk memperbaiki perencanaan pembelajaran berikutnya.

Apa yang dinilai dalam asesmen hasil belajar sejarah baik dalam bentuk pengetahuan, ketrampilan kognitif, psikomotorik, nilai dan sikap perlu dinyatakan secara eksplisit: (1) pengetahuan dan pemahaman tentang peristiwa sejarah lokal dan nasional; (2) kemampuan mengkomunikasikan pemahamannya mengenai peristiwa sejarah dalam bahasa lisan dan tulisan; (3) kemampuan menarik pelajaran/nilai dari suatu peristiwa sejarah; (4) kemampuan menerapkan pelajaran/nilai yang dipelajari dari peristiwa sejarah dalam kehidupan sehari-hari; (5) kemampuan melakukan kritik terhadap sumber dan mengumpulkan informasi dari sumber; (6) kemampuan berfikir historis dalam mengkaji berbagai peristiwa sejarah dan peristiwa politik,

sosial, budaya, ekonomi yang timbul dalam kehidupan keseharian masyarakat dan bangsa; (7) memiliki semangat kebangsaan dan menerapkannya dalam kehidupan kebangsaan. Untuk penilaian hasil belajar karakter dapat digunakan berbagai alat seperti observasi, *performance assessment*, dan *port-folio assessment*. Tes objektif tidak dapat digunakan untuk hasil belajar karakter.

SIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka materi pendidikan sejarah baik sebagai IPS mau pun sebagai mata pelajaran yang berdiri sendiri sangat penting dan memiliki kontribusi tinggi terhadap Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Peran yang penting itu dilakukan dengan mengubah berbagai aspek terkait dengan tujuan dan materi pendidikan sejarah. Oleh karena itu, perlu perubahan dari penghafalan kata menjadi pengetahuan dan berpikir, dari jawa sentries, menjadi meliputi daerah lain. Dari menerima pengetahuan, menjadi pengembangan pengetahuan. Dari tidak terkait dengan masa kini, menjadi dapat diterapkan dalam kehidupan sekarang. Kemudian dari belajar tentang hasil menjadi belajar tentang manusia/masyarakat yang menghasilkan, serta perubahan dari kurang mengandung nilai, menjadi syarat dengan nilai.

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, S.H. 2007. "Pendidikan Sejarah untuk Pengembangan Potensi Kemanusiaan Peserta Didik". *Makalah*. Dikemukakan pada Kongres Masyarakat Sejarah Indonesia
- Jakubowski, C.T. 2002. "Teaching World History: Problems and Promises Faced by Young Teachers". *World History Bulletin*

- tin.* XVIII, 2.
- Borries, Bodo von. 2000. "Methods and Aims of Teaching History in Europe: A Report on Youth and History". *Knowing Teaching & Learning History: National and International Perspectives* (Eds. Stearns, P.N., Seixas, P., Wineburg, S.). New York: New York University Press
- Koblin, D. 1996. *Beyond the Textbook: teaching history using documents and primary sources*. Portsmouth, NH: Heinemann.
- Pusat Pengembangan Kurikulum (2010). *Pedoman Pengembangan Pendidikan Budaaya dan Karakter Bangsa bagi Sekolah*. Jakarta: Kementerian Pendidikan Nasional
- Levstik, L.S. 2000. "Articulating the Silences: Teachers' and Adolescents' Conceptions of Historical Significance", dalam Stearns, P.N., P. Seixas, dan S. Wineburg. *Knowing Teaching and Learning History: National and International Perspectives*.
- Wineburg, S. 2000. *Making Historical Sense*, dalam *Knowing Teaching and Learning History: National and International Perspectives*. New York: New York University Press
- Wineburg, S. 2001. *Historical Thinking and Other Unnatural Acts: Charting the Future of Teaching the Past*. Philadelphia: Temple University Press